



**MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK
DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL YUSUFIAH
KECAMATAN RANTAU SELATAN**

Mansur Keling¹, Suwandi² Maraya Monang Hasibuan³

mansur.kelinguinsu@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

suwandi@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

marayamonanghasibuan@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Quality Improvement Plan for Educators at Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah, Rantau Selatan District.

This study uses a qualitative method, because it intends to explain the behavior of teachers and students in learning through the play model. While the data collection is using interview techniques, observation and documentation. Then to analyze the data is done by data reduction process, data exposure and drawing conclusions. To ensure the validity of the data, triangulation was carried out between methods, both interview data with observation, and documentation, as well as triangulation between informants.

The results of this study that the implementation of the plan to improve the quality of educators in Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah, Rantau Selatan District has not fully followed the stages of implementing the general guidelines for implementation, because the concepts and objectives of the policy have not been fully understood by policy actors as a result of the implementation of policy socialization which is considered to be less than the maximum of courage and reactivity carried out by both the principal and teachers or educators at Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah, Rantau Selatan District. Supervision of Quality Improvement of Educators at Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah, Rantau Selatan District includes several stages, namely: supervision carried out at the beginning as a tool to anticipate or initial steps on the existence of obstacles and obstacles as well as deviations from the standards and objectives that have been prepared as well as a correction tool before a program is completed. Supervision during activities is a process carried out by prioritizing considerations.

Keywords: *Planning, Quality of Education*

Rendahnya mutu pendidikan terkait dengan kebijakan yang dipakai oleh pemerintah selama ini dalam membangun pendidikan, yang lebih menekankan pada dimensi struktural dengan pendekatan *input-output*. Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan meningkatkan pola penerapan manajemen.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia. Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak sampai tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Hal tersebut masing sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) bab II pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggungjawab. Dan pada bab III pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Akibat dari kontradiksi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolah kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan di muka, perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (*quality oriented*) merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak.

Berbicara mengenai kualitas sumberdaya manusia. Islam memandang bahwa pembinaan sumberdaya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri, dengan demikian Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumberdaya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang otonomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada sekolah, agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah, karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah untuk menghasilkan SDM yang berkualitas

KAJIAN TEORITIS

1. Defenisi Mutu

Mendefenisikan mutu produk ada lima pakar utama dalam manajemen mutu terpadu yang saling berbeda pendapat tetapi maksudnya sama. Pendapat kelima pakar tersebut tentang kualitas atau mutu ialah sebagai berikut:

Menurut Juran (1993) mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu (1) teknologi yaitu kekuatan, (2) psikologis, yaitu citra rasa atau status, (3) waktu, yaitu kehandalan (4) kontraktual, yaitu ada jaminan dan (5) etika, yaitu sopan santun.

Kecocokan penggunaan produk tersebut memiliki dua aspek utama, yaitu ciri-ciri produknya memenuhi tuntutan kastemer dan tidak memiliki kelemahan. Adapun ciri-ciri produk yang memenuhi tuntutan pelanggan yaitu produk tersebut bermutu tinggi dan memiliki ciri khusus yang berbeda dari produk pesaing serta dapat memenuhi harapan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Dengan mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual, dapat bersaing dengan pesaing, meningkatkan pansa pasar, omset penjualan dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Dengan mutu produk perusahaan yang tinggi, menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi pengerjaan kembali dan pemborosan, mengurangi pembayaran biaya garansi, mengurangi ketidakpuasan pelanggan, mengurangi pengujian, meningkatkan hasil, dan meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi serta memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa (Salis, 1993). Jika hal ini telah dimiliki oleh perusahaan dan institusi pendidikan, kedua lembaga tersebut akan eksis dan solid dalam era global yang sarat dengan muatan kompetensi.

Menurut Crosby (1979: 58) mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

Menurut Deming (1982: 176) mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang maupun jasa.

Menurut Feigenbaum (1986) mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Garvi dan Davis (1994) menyatakan bahwa mutu ialah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan perubahan mutu produk tersebut, diperlukan peningkatan atau perubahan keterampilan tenaga kerja, proses produksi, dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi dan melebihi harapan konsumen.

Menurut Umaedi (1999) secara umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Menurut Juran (1962) kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa sekarang dan di masa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Menurut Goetch dan Davis (1995) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi menyinkronkan berbagai input tersebut atau menyinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang nonakademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun, 5 tahun bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dan dapat pula berprestasi di bidang lain. Bahkan prestasi sekolah dapat

berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati, keberhasilan, toleransi, emosional dan sebagainya.

Profesionalisme dan kompetensi merupakan dua hal yang menentukan parameter seseorang yang berkualitas atau tidak bermutu. Keduanya merupakan kedua hal yang tidak terpisah satu sama lainnya.

a. Profesionalisme Guru

Kata profesional adalah kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus disiapkan untuk itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

b. Kompetensi Tenaga Pendidik

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Brokke and Stone (1995) yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sementara Charles (1994) yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

METODE

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena bermaksud menjelaskan perilaku guru dan murid dalam pembelajaran melalui model bermain. Sedangkan pengumpulan data adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk menganalisis data wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan dengan proses reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data yang dikumpulkan yaitu dengan melakukan triangulasi (pemeriksaan silang data) antar metode, baik data wawancara dengan observasi, dan dokumentasi, maupun data wawancara dari berbagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan pertama, dalam penelitian ini ditemukan bahwa perencanaan peningkatan mutu yang dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pelaksanaannya berlangsung secara baik dan harmonis. Perencanaan peningkatan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait. Bentuk perencanaan yang direncanakan berbentuk pada perencanaan sumber daya manusia, sumber daya finansial (dana) dan sumber daya sarana prasarana serta pengembangan lainnya. Perumusan perencanaan peningkatan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan dengan melalui musyawarah dan rapat dengan melibatkan semua komponen penting dalam sebuah organisasi atau madrasah ini antara lain: ketua yayasan, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite madrasah, dan mewakili wali siswa. Di dalam keberlangsungan musyawarah maupun rapat ini digunakan prinsip partisipasi guna memberikan saran-saran, masukan-masukan dan ide-ide positif yang dapat diterapkan dalam perencanaan peningkatan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan.

Mengenai musyawarah yang dilakukan dengan cara melibatkan komponen yang ada demi mencapai tujuan dan kemufakatan bersama demi mencapai tujuan bersama. Hal ini terkandung dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syuura: 38 yang berbunyi:

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut penjelasan dalam tafsir Ibn Katsir mengenai maksud firman Allah As-Syuura ayat 38 adalah, "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan*", yaitu mereka yang mengikuti Rasul-Nya dan mentaati perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. (*Dan melaksanakan shalat*), merupakan ibadah teragung kepada Allah SWT. (*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*) maksudnya mereka tidak mau memutuskan suatu perkara atau mengambil suatu keputusan, kecuali mereka musyawarahkan terlebih dahulu. musyawarah ini membantu mereka memutuskan perkara-perkara seperti perang dan lainnya.

Al-Imran Ayat 159 yang berbunyi:

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan mereka, dan bermusyawalah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.

Surah Ali Imran ayat 159 di atas menjelaskan tentang adanya rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau senantiasa berakhlak mulia, berhati lembut, penuh kasih sayang, bersifat dan berperilaku baik yang diridhai Allah SWT, selain itu Rasulullah juga suka memberi maaf, memohonkan ampun kepada Allah swt, bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan dan selalu bertawakkal kepada Allah swt.

Hal yang diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tarmizih yaitu:

Telah menceritakan kepada kami Hushain bin Ali dari Zai`dah dari Simak dari Hanasy dari Ali Radhiallah 'anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw: “Apabila dua orang minta keputusan kepadamu, maka janganlah engkau menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan orang yang kedua. Jika demikian engkau akan mengetahui bagaimana engkau mesti menghukum”. ‘Ali berkata : Maka tetap saya jadi hakim (yang layak) sesudah itu”. (H.R. Ahmad No.1148, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ia hasankan-dia, dan dikuatkan-dia oleh Ibnul-Madini dan dishahkan-dia oleh Ibnu Hibban)”.

Dari Ayat dan Hadist di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya pengambilan dan pembuatan kebijakan Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan yang dilakukan dengan cara musyawarah ini membuat para personil yang terlibat di dalamnya memiliki rasa bertanggung jawab penuh dan berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan.

Situasi pengambilan keputusan yang dihadapi seseorang akan mempengaruhi keberhasilan suatu keputusan yang akan dilakukan. Setelah seseorang berada dalam situasi pengambilan keputusan maka selanjutnya dia akan melakukan tindakan untuk mempertimbangkan, menganalisa, melakukan prediksi, dan menjatuhkan pilihan terhadap alternatif yang ada.

Sementara itu kegiatan manajemen yang dilakukan oleh kepala madrasah guna meningkatkan mutu tenaga pendidik Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dilakukan dengan cara melakukan pembinaan bagi guru melalui pendisiplinan, penilaian terhadap kinerja guru, melakukan penilaian terhadap perkembangan KBM, Diklat, memberdayakan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain (studi komperatif), mengadakan hubungan dengan wali siswa, melaksanakan supervisi yang berkelanjutan, mengikuti seminar. Dalam kaitan dengan pembinaan guru ini, kepala madrasah hendaknya memandang ini sebagai bentuk suatu usaha kepala madrasah kepada para tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

Dalam kaitan proses pembinaan tenaga pendidik yang dilakukan kepala madrasah, posisi guru hendaknya ditempatkan sebagai pembelajar. Oleh karena itu paradigma ini harus mampu dituangkan oleh kepala madrasah ke dalam beberapa prinsip pembinaan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara kepala madrasah dengan tenaga pendidik diantaranya: (1) ilmiah, dilaksanakan secara sistematis (2) kooperatif, kerjasama yang baik antara pembinaan dan guru (3) konstruktif, pembinaan dalam rangka perbaikan keprofesionalan (4) realistik, sesuai dengan keadaan kebutuhan guru (5) progresif, dilaksanakan maju selangkah demi selangkah (6) inovatif, mengiktiarkan hal-hal yang baru (7) menimbulkan perasaan aman bagi guru dan (8) memberikan kesempatan mengevaluasi bersama pembina dan guru.

Sementara fungsi pembinaan ini diperuntukkan pada upaya (1) pemeliharaan program pengajaran sebaik-baiknya, (2) menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, (3) memperbaiki situasi belajar peserta didik.

Jadi ringkasnya pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap tenaga pendidik berfungsi untuk menumbuhkan iklim bagi proses dan hasil belajar melalui serangkaian upaya pembinaan guru ini berlangsung tepat pada sasaran maka sasaran yang diharapkan adalah munculnya sikap profesionalisme yang tinggi dalam setiap gerak dan langkah seorang tenaga pendidik.

Implikasi yang diharapkan dari kondisi ini adalah akan terciptanya pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, kepedulian dan kesadaran bahwa tugas mengajar bukan hanya semata-mata memberikan atau mentranformasikan ilmu

pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari pada itu kegiatan ini juga dimaksud sebagai upaya pembinaan dan pembentukan karakter kepribadian peserta didik yang memiliki keunggulan dalam ilmu dan kebaikan dalam hal normal atau akhlak.

Sedangkan pencapaian standarisasi layanan sekolah guna menopang mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas layanan sekolah baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat teknis administrasi.

Temua kedua, pengorganisasian peningkatan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan dengan cara perincian atau pembagian seluruh tugas, pekerjaan yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh setiap personil dalam organisasi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dalam hal pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pembagian beban akan tugas dan tanggung jawab menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap individu dengan berkoordinasi akan pelaksanaannya dengan para anggota personil sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis dalam suatu manajemen organisasi. Pengorganisasian telah menciptakan dasar-dasar kerjasama yang saling mendukung antara personil manajemen dalam pencapaian tujuan sekolah.

Implikasi yang diharapkan dari kondisi ini adalah akan terciptanya suasana yang harmonis dalam menjalankan tugas masing-masing dari tenaga pendidik, menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap individu dengan saling berkoordinasi dengan para anggota personil lain sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis dalam suatu manajemen organisasi.

Temuan ketiga, pelaksanaan peningkatan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan belum sepenuhnya terlaksanakan secara maksimal dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang ketercapaian tujuan yakni peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan. Perencanaan yang dilakukan di awal tahun ajaran baru yang telah disusun sebagian telah memenuhi standar serta tuntutan manajemen peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya perencanaan telah disusun dengan yang meliputi sebagian besar kegiatan-kegiatan dan program peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan.

Pelaksanaan program manajemen berupa kegiatan-kegiatan telah mengimplimentasikan rencana yang telah disusun, bahkan terdapat dalam pelaksanaan

yaitu peningkatan mutu tenaga pendidikan dengan melaksanakan mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain (studi komperatif), mengadakan hubungan dengan wali siswa, melaksanakan supervisi yang berkelanjutan, mengikuti seminar,

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat utama yang dirasakan oleh kepala madrasah dalam kaitannya dengan manajemen peningkatan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan adalah persoalan dana dan sarana prasarana serta tersedianya fasilitas madrasah yang terbatas. Persoalan ini sebenarnya persoalan klasik bagi dunia pendidikan Indonesia. Pembiayaan yang dilakukan hanya berdasarkan sumber siswa pada setiap bulannya. Usaha antisipasi yang dilakukan oleh kepala madrasah beserta anggota sekolah lainnya adalah dengan cara melaksanakan beberapa pendekatan kepada Dinas pendidikan Kabupaten dan Propinsi serta Dinas Pendidikan pusat. Disamping meningkatkan kerjasama dengan wali siswa untuk berpartisipasi menyelesaikan persoalan ini melalui pemberdayaan komite madrasah, walaupun dalam pelaksanaannya partisipasi komite madrasah ini belum maksimal bagi perubahan dan penyelesaian masalah sekolah yang dihadapi.

Disisi lain salah satu hal yang menjadi faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan terletak pada kesadaran serta loyalitas keprofesionalan beberapa para staf atau tenaga pendidik yang kurang memahami akan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Hal ini terbukti bahwa ada beberapa guru atau tenaga pendidik yang terlambat datang ke sekolah, untuk hal ini kepala madrasah membuat kebijakan tersendiri terhadap individu tersebut dengan cara berkomunikasi atas penyebab keterlambatan yang terjadi pada guru atau pendidik yang bersangkutan.

Implikasi yang diharapkan dari kondisi adalah diharapkan tenaga pendidik mampu melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada kualitas dan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

1. Perencanaan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dilakukan melalui identifikasi, analisis, penyusunan konsep dan rencana, menentukan rencana, penerapan rencana, tujuan, manfaat,

langkah-langkah perencanaan, tahapan-tahapan perencanaan, mencakup indikator atau target mutu yang akan dicapai sebagai proses peningkatan mutu pendidikan. Bentuk perencanaan meliputi pengaturan segala sumber daya, yang berisikan tentang perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana. Perencanaan pada pendanaan dan biaya berisikan tentang pengalokasian dana dan sesuai dengan sasaran untuk pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan proses pembelajaran, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

2. Pengorganisasi Sumber Daya dalam Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan dengan proses perincian seluruh pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi atau madrasah, pembagian tugas atau beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh setiap individu serta pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.
3. Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan belum sepenuhnya mengikuti tahapan pelaksanaan pedoman umum pelaksanaan, karena konsep dan tujuan kebijakan belum dipahami secara utuh oleh pelaku kebijakan sebagai akibat dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang terbilang kurang maksimal. Selain dari pada itu, disebabkan juga karena kurang diberdayakannya kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, komite sekolah dan tidak diberikannya wewenang dan kebebasan penuh terhadap kepala sekolah selaku aktor utama kebijakan dan juga guru yang melaksanakan kebijakan, serta masih kurangnya keberanian dan reaktivitas baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru atau pendidik pada Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan.
4. Pengawasan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan meliputi beberapa tahapan, yaitu: pengawasan yang dilakukan diawal sebagai alat untuk mengantisipasi atau langkah awal terhadap adanya kendala dan hambatan serta adanya penyimpangan dari standar dan tujuan yang telah disusun serta sebagai alat koreksi sebelum suatu program dileselesaikan. Pengawasan pada saat kegiatan berlangsung, merupakan proses yang dilakukan dengan mendahulukan pertimbangan

SARAN

Kepada Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah Al Yusufiah Kecamatan Rantau Selatan agar kiranya perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan melalui pertemuan rutin maupun pada kesempatan program pelatihan. Program pelatihan yang dilakukan terhadap guru atau pendidik hendaknya mengikut sertakan warga sekolah (kepala sekolah, guru, ketua komite dan tokoh masyarakat), materi pada pelatihan perlu kiranya memasukkan pelatihan kepemimpinan transformasional dan materi mengenai ciri dan kemampuan guru efektif dan profesional perlu kiranya dimasukkan dalam program pelatihan yang akan diberlangsungkan pada pelatihan berikutnya. Selain itu materi mengenai evaluasi program rencana strategis jangka panjang 3 sampai 5 tahun perlu dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, James J. Secondary School Administration. New York: McGraw Hill, Book Company, (1969).
- Tri Firmansyah, Achmad Supriyanto, Agus Timan Efektivitas Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Di Sma Laboratorium Vol 2 No3
- Ikhlusal Amal Ahyani, Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Untuk Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menggunakan Google Maps Api (Studi Kasus: Kec. Kaliwungu Kab. Kendal) Vol 4 No 3 2013 akses jam 7 wib tanggal 1 2020 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/issue/view/164>
- Nur Indah Fadhilah, Peranan Sarana dan Prasarana Pendidikan Guna Menunjang Hasil Belajar Siswa di SD Islam Al Syukro Universal Vol 1 No 2 2017 akses jam 11 wib tanggal 1 2020 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24635>
- Suri Margi Rahayu, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Vol 27 No 2 2015 akses jam 12 wib tanggal 2 2020 <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/1724>
- RAkpan, J. ., & Beard, L. . (2014). Assistive Technology and Mathematics Education. *Journal of Educational Research*, 2(3), 219–222.
- Asfaroh, J. ., Rosana, D., & Supahar. (2017). Development of CIPP Model of Evaluation